

DAMPAK KEBIJAKAN EKSPANSIF PEMERINTAH MELALUI TUNJANGAN PRESTASI KERJA (TPK) TERHADAP PERMINTAAN AGREGAT DAN INFLASI

Ery Jayanti

Jabal Ghafur University, Sigli
E-mail: ery_jayanti@yahoo.com

Abstract

The study aimed to investigate how the effects of expansionary policies of the government through the provision of work performance benefits in the provincial government of Aceh on Aggregate Demand and Inflation. This study was conducted by using time series data for the period Januari 2010- april 2016, which is implemented in the monthly data sourced from Aceh Province Budget (DKA - ACEH), the Central Statistics Agency of Aceh (BPS-Aceh) and Bank Indonesia in Regional Financial Statistics Indicators and other institutions related to the research question. The method used was descriptive quantitative method by using Multiple Linier Regresion analysis model (OLS). This study used secondary data from Januari 2010 to april 2016. The data used was monthly data by the number of samples as many as 76 months. The Results showed that there was significant effect between the expansionary policies of the government and aggregate demand, but inflation, no significantly meaning that work performance insentive of the staff of the local government in Aceh would not affect. Then Fiscal Ekspansif policy implementation to do

Keywords: *The Consumption Behavior, The Consumption, The Consumption in Islam*

Abstrak

Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh kebijakan ekspansif pemerintah melalui pemberian tunjangan prestasi kerja di Lingkungan pemerintahan Provinsi Aceh terhadap Permintaan Agregat dan Inflasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data time series pada periode Januari 2010- April 2015, diimplementasi dalam data bulanan bersumber dari Dana Keuangan Provinsi Aceh (DKA - ACEH), Badan Pusat Statistik (BPS-Aceh) dan Bank Indonesia dalam Indikator Statistik Keuangan Daerah. Metode yang digunakan adalah Metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun Januari 2010 – April 2015, dengan jumlah Sampel sebanyak 76 bulan. Hasil penelitian melalui uji estimasi menunjukkan permintaan agregat secara signifikan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah melalui pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK), secara positif dalam jangka panjang. Untuk variabel pengeluaran pemerintah dalam hal ini tunjangan prestasi kerja tidak berpengaruh terhadap inflasi. kesimpulannya kebijakan ekspansif ini masih bisa dijalankan.

Kata Kunci: *Kebijakan Ekspansif, Permintaan Agregat, Inflasi, TPK.*

PENDAHULUAN

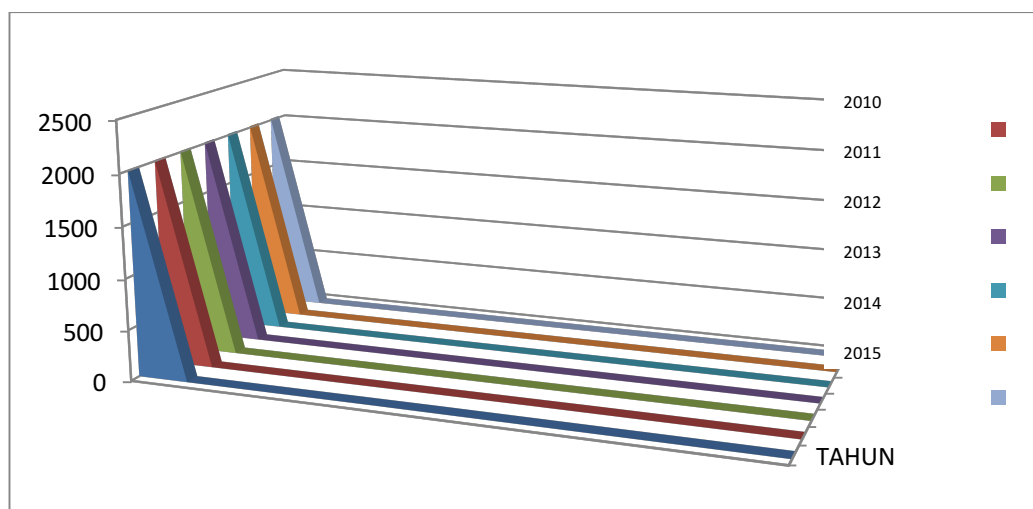
Sektor ekonomi Aceh semakin berkembang sejak sepuluh tahun terakhir, dengan indikator makro ekonomi yang sangat diapresiasi, pertumbuhan mencapai 6 %, PDRB Aceh 2015 sebesar 8.730 689,2 Triliun atau meningkat 5,3% tahun sebelumnya, PDRB perkapita Rp 17,6 juta, jumlah penduduk yang bekerja di sector informal 72,3 %, tingkat inflasi 6,19 %, Tingkat inflasi inilah yang menjadi pembicaraan public, sehingga menjadi menarik untuk dilihat dalam bahasan ini, alasannya karena Aceh penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia peringkat ketiga setelah Papua dan Kalimantan, dampak inflasi Aceh meresahkan masyarakat, karena prinsipnya inflasi menurunkan daya beli segolongan orang. sebagian orang menyebut keadaan ini sebagai bentuk inflasi meningkat, akan tetapi segolongan masyarakat meningkatkan permintaannya atas barang dan jasa. Bisa dikemukakan seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibandingkan seseorang masyarakat yang pendapatannya rendah.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menyebutkan bahwa apabila pendapatan meningkat, maka permintaan atas barang dan jasa juga meningkat, dengan asumsi tidak ada faktor lain yang berubah, atau secara makro ekonomi diperjelas bahwa pendapatan akan selalu sama dengan konsumsi ($Y = C$), dalam bahasan ini yang ingin dilihat adalah efek tambahan pendapatan, akibat kenaikan upah lebih tepatnya disebut insentif atau upah tambahan, sehingga pendapatan sama dengan gaji ditambah insentif ($Y = W + W_t$), yang menyebabkan terjadinya penambahan permintaan atas barang dan jasa, sehingga harga-harga turut meningkat.

Inflasi adalah suatu keadaan naiknya harga-harga umum atas barang dan jasa secara menyeluruh dan terus menerus, atau segala sesuatu yang menggeser agregat demand ke kanan atau ke kiri menyebabkan inflasi. Inflasi akan berlanjut terjadi ketika tingkat harga keseluruhan terus naik dalam suatu periode dalam waktu yang cukup lama, tingkat inflasi yang masih bisa ditolerir adalah bila dibawah batas Inflation Targeting Framework pemerintah, sementara target inflasi pemerintah Aceh tahun 2015 adalah 6,5 %, perkembangan inflasi seperti terlihat pada Gambar.1.

Bentuk kebijakan fiskal ekspansif Pemerintah Aceh dalam penelitian ini adalah menetapkan insentif berupa tunjangan prestasi bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kota Provinsi Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 840/269/2008, menindaklanjuti ketentuan pasal 8 peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 58 Tahun 2006, dan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2009 tentang pengelolaan Keuangan Daerah makabesaran nominal tunjangan kerja bagi gubernur, wakil gubernur, pejabat struktural, dan pegawai negeri sipil non PNS serta tenaga Honorar di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah dengan tolok ukur kinerja pegawai yang dinilai melalui kehadiran atau absensi dan E-Kinerja yang

memenuhi syarat bayar, secara teknis pembayaran tunjangan prestasi dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan dan jabatan.

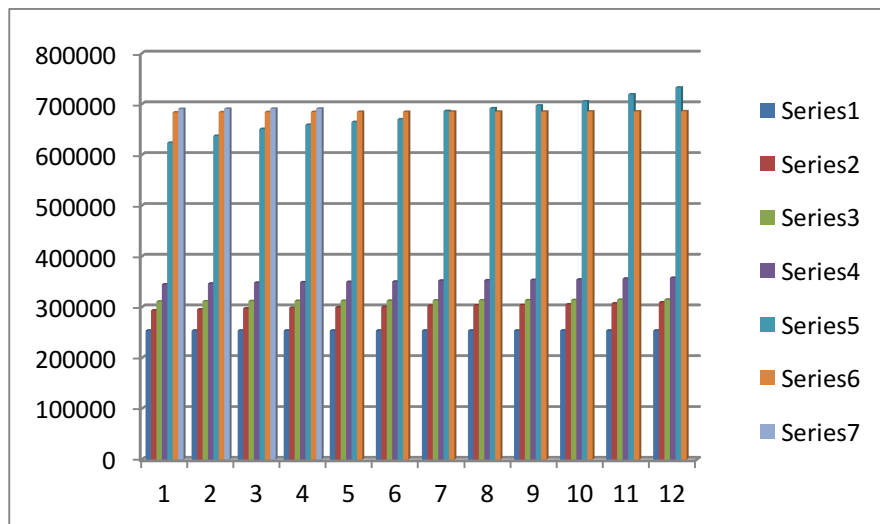


Sumber; BPS Aceh 2016

Gambar 1. Laju Inflasi Provinsi Aceh periode Januari 2010- oktober 2016

Untuk pemberian tunjangan di lingkungan pegawai pemerintah kota B. Aceh ditetapkan melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Standarisasi Biaya.

Dengan kebijakan ekspansif berarti pemerintah telah melakukan peningkatan pengeluaran, yang menyebabkan jumlah uang beredar lebih banyak maka dapat dirasakan dampak dari kebijakan tersebut adalah terjadi inflasi yang disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat atau disebut inflasi *Demand Pull*. Fenomenanya adalah masyarakat Aceh menikmati inflasi tinggi. Ditandai meningkatnya permintaan atas kebutuhan pokok, sandang, perumahan meningkat, serta jasa-jasa pendidikan. Realisasi perkembangan permintaan agregat seperti data berikut pada Gambar 2.



Sumber; Indikator Statistik Ekonomi Indonesia, BPP Vol - X1, BPS Aceh 2015

Gambar 2. Perkembangan Permintaan Agregat Periode Januari 2010-Okttober 2016

Atas dasar fenomena yang terjadi di kota provinsi saat ini dari pola konsumsi masyarakat, yang tidak hanya terhadap kebutuhan pokok, tetapi juga pada kebutuhan mewah, dapat disimpulkan masyarakat kota provinsi aceh lebih konsumtif, kebutuhan dimaksud misalnya mobil, yang rata-rata memakai keluaran terbaru. kemudian bentuk rumah yang tidak lagi terlihat sebagai sarana penuhan kebutuhan jumlah anggota keluarga, tapi melebihi dari rasio jumlah anggota keluarga terhadap luas dan bentuk rumah, dan pada umumnya yang mengkonsumsi terhadap barang tersebut adalah para pegawai pemerintahan kota propinsi dan pegawai ibukota Banda Aceh.

Fenomena yang terlihat sangat berbeda dengan sepuluh ataupun lima belas tahun lalu, kesejahteraan pegawai negeri sangat signifikan akhir-akhir ini, setelah pemerintah mengimplementasikan kebijakan peningkatan pengeluaran rutin bagi pegawai dianggap insentif tambahan. Atas dasar realita yang terjadi dan didasarkan landasan teori yang ada maka tertarik rasanya untuk mencari tau apakah yang dianggap factor penyebab inflasi melalui peningkatan permintaan agregat benar adanya, maka masaalah ini perlu diuji Sdan ditelusuri.

Tabel: 1
Realisasisi TPK Yang Diterima Pegawai kota B. Aceh Dan Pegawai Provinsi
Tahun 2010 - 2016

Bulan	Jumlah Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) per- tahun (Miliaran Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jan.	24.324.323.454	24.836.313.380	25.677.789.932	25.993.232.224	29.296.345.435	29.476.577.354	32.393.434.575
Feb.	24.474.244.255	24.836.423.340	25.687.220.932	25.963.264.263	29.346.544.543	29.576.485.845	32.423.521.433
Maret	24.498.421.242	24.925.713.281	25.787.321.932	25.879.234.524	29.534.743.535	25.476.586.874	32.564.257.425
April	24.536.123.242	24.857.413.280	25.887.340.932	25.992.342.224	29.548.792.435	29.676.569.649	32.465.645.271
Mei	24.593.432.082	24.887.313.254	25.985.832.932	25.998.235.824	29.645.450.736	29.776.589.623	-
Juni	24.554.224.453	24.957.313.478	25.988.345.930	26.095.235.784	29.629.365.329	29.678.877.348	-
Juli	24.582.234.321	24.966.413.384	25.997.896.327	26.097.235.224	29.768.347.368	29.778.481.354	-
Agust	24.683.764.442	25.136.422.383	25.988.739.326	26.095.232.574	29.853.387.535	29.858.837.735	-
Sept.	24.746.854.264	25.231.315.375	26.387.996.855	26.145.862.421	29.864.764.766	29.828.859.546	-
Okt.	24.746.353.264	25.346.312.382	26.991.993.375	26.136.237.534	29.968.545.968	29.978.237.734	-
Nov.	24.824.464.335	25.476.313.455	26.990.299.932	26.166.233.886	29.987.645.435	29.986.975.875	-
Des.	24.826.955.421	25.546.357.383	25.987.789.932	26.176.625.384	29.988.445.475	29.996.586.751	-

Sumber : Dinas Keuangan Kota B.Aceh,dan Dinas Keuangan Provinsi, 2016

TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan Exspansif Pemerintah

Menurut teori Keynes peran pemerintah dalam perekonomian diperlukan hingga batas tertentu, misalnya bila terjadi pengangguran pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya agar rakyat tidak menganggur, akhirnya bisa mendapatkan pendapatan kalau harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar sehingga inflasi terkendali, pemerintah dapat menjalankan kebijakan pengelolaan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif. Heru Perlambang (2010).

Penelitian oleh Perroti dan Roberto (1991) , menyimpulkan bahwa dampak kenaikan pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan menengah, justru bersifat kontraktif. Yaitu kenaikan pengeluaran pemerintah awalnya tidak berdampak pada permintaan output, tetapi pada periode selanjutnya justru meningkatkan permintaan output dan inflasi, ketika itu maka kebijakan sudah bersifat ekspansif.

Dalam setting perekonomian secara umum fungsi bank central adalah mengendalikan tingkat harga, bahwa “ inflation is always and everywhere a monetary phenomenon”. Namun demikian

pandangan tradisional ini mendapat tantangan dari fiskal theory of the price level (FTPL) yang dikembangkan oleh Leeper (1991), (Woodford (1994,1995), dan Sim (1994) menyatakan bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam penentuan harga melalui budget constraint yang terkait dengan kebijakan utang, pengeluaran dan perpajakan.

Penelitian Perlambang (2012) menegaskan secara garis besar Keynes menyebutkan bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. perlu dianalogikan bagaimana penawaran dan permintaan agregat secara bersama-sama bisa menentukan tingkat keseimbangan dari pendapatan dan harga-harga pada kondisi tertentu dalam perekonomian, dicerminkan oleh perilaku kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

Dampak Kebijakan Ekspansif Terhadap Permintaan Agregat

Permintaan agregat (AD) adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat, dengan kata lain permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli semua masyarakat pada setiap tingkat harga. Case & Fare (256, 2007). *Diskrit fiscal* (kebijakan fiskal kearah ekspansif/ kontratif) antara lain dapat mendorong volatilitas inflasi.

Studi mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu study yang lebih focus pada jangka waktu yang lebih panjang terkait dampak deskrit fiskal terhadap inflasi. sementara itu, dampak kebijakan fiskal ke inflasi menurut Rother (2004) dapat terjadi melalui dampak kebijakan fiskal dalam mempengaruhi permintaan agregat, yaitu penambahan upah pegawai negeri (*public wage*) dan ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar utangnya.

Dampak Kebijakan Exspansif Terhadap Inflasi

Beberapa para ahli mendefinisikan Inflasi secara berbeda-beda tapi pengertiannya hamper sama, diantaranya; Kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan secara terus-menerus. (Boediono, 2004: 161). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu. (Case & Fare, 2008: 25). Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, harga beras, bahan bakar, harga mobil naik, tingkat upah, harga tanah, dan semua barang-barang modal naik. (Samuelson dan Nordhaus, 2008 : 293)

Mankiw (2006) memberi penjelasan tentang inflasi dengan sedikit ilustratif, mengenai turunnya daya beli? Kekeliruan mengenai inflasi.

Bila anda bertanya kepada orang tertentu mengapa inflasi tidak baik, orang tersebut akan mengatakan kepada anda bahwa jawabannya sudah jelas, yaitu inflasi mengurangi daya beli uang

yang telah diperolehnya dengan susah payah. Apabila harga naik, setiap lembar uang yang dihasilkannya hanya akan mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi, kelihatannya inflasi secara langsung telah menurunkan standar hidup.

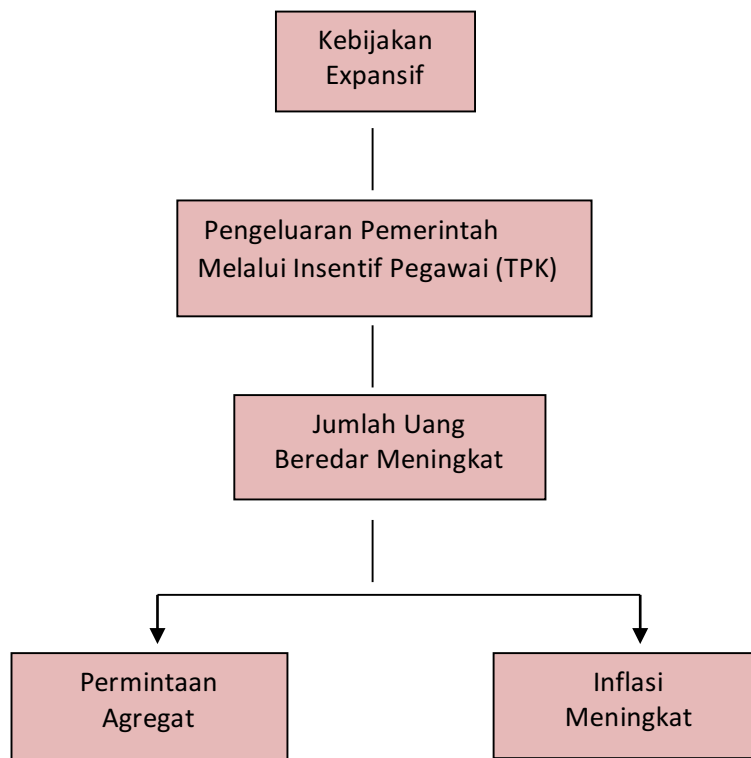
Namun, pemikiran yang lebih mendalam mengungkapkan adanya kekeliruan pada jawaban ini. Ketika harga naik, pembeli barang dan jasa akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membayar apa yang mereka beli. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan. Pejualan barang dan jasa mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan mereka. karena kebanyakan orang mendapatkan penghasilan dengan menjual jasa mereka, seperti para tenaga kerja, penghasilan juga meningkat sejalan kenaikan harga. Jadi, inflasi sendiri tidak mengurangi daya beli riil masyarakat.

Masyarakat mempercayai kekeliruan mengenai inflasi ini karena mereka tidak menghargai prinsip kenetralan moneter. Seorang pekerja yang menerima kenaikan upah tahunan sebesar 10 persen cenderung melihat kenaikan tersebut sebagai penghargaan atas kemampuan dan usaha mereka sendiri.

Mceacheurn (237 ; 2002) mengilustrasikan kebijakan ekspansif pemerintah, melalui gambaran dari kenaikan pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kesempatan kerja tanpa inflasi, pendapatnya bisa disimpulkan “ jika harga kenaikan harga berarti kenaikan penerimaan pemilik sumberdaya, mengapa orang-orang begitu diributkan oleh inflasi? orang memandang bahwa pendapatan lebih tinggi adalah imbalan yang pantas sebagai finalti yang secara tidak adil merampok daya belinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa jika kenaikan harga. Harga dan Upah adalah dua sisi mata uang, jika upah nominal selalu menyesuaikan inflasi, pekerja tidak akan kehilangan pendapatan Riil sebagai akibat adanya inflasi, maka bekerjanya harga adalah karena ada bekerjanya permintaan dan penawaran

Dalam setting perekonomian secara umum, fungsi Bank central adalah mengendalikan tingkat harga. Hal ini terkait dengan teori quantity of money oleh Milton Fridman yang menyatakan bahwa “ inflation is always and everywhere a monetary phenomenon,” akan tetapi pandangan tradisional ini mendapat tantangan dari “ *Fiscal Theory of Price level* yang dikembangkan oleh Leper (1191) dan Sim (1994), yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam penentuan harga melalui budget counstrain yang terkait dengan kebijakan utang, pengeluaran pemerintah seperti pembayaran gaji tambahan untuk pegawai, dan penetapan pajak.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

1. Adanya pengaruh positif antara kebijakan ekspansif pemerintah melalui pemberian Tunjangan Prestasi Kerja Pegawai (TPK) terhadap Permintaan Agregat (Yqdt)
2. Adanya pengaruh positif antara kebijakan ekspansif pemerintah melalui Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja Pegawai terhadap Inflasi (IFL).

METODE PENELITIAN

Data dan Variabel

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa kuantitatif dengan tehnik estimasi untuk menganalisa pengaruh kebijakan ekspansif pemerintah terhadap permintaan output agregat dan tingkat Inflasi. Adapun alat analisis yang digunakan adalah pendekatan non parametric menggunakan metode regresi linier.

Data-data yang diperoleh terdiri dari data sekunder dalam runtut waktu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Dinas keuangan Daerah (DKA), Dinas keuangan Kota B. Aceh dan Bank Indonesia dalam Indikator Statistik Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan variable-variabel dalam model yang digunakan sebagai mana terdapat pada tabel berikut dengan frekuensi data bulanan sejak januari 2010 – April 2016. Terkait dengan variable diskrit kebijakan fiskal, maka definisi kebijakan fiskal diskrit yang digunakan dalam penelitian ini adalah seberapa besar setiap bulan pemerintah melakukan pengeluaran terhadap biaya rutin pegawai (Tunjangan Prestasi Kerja) melalui anggaran APBD. Penelitian akan dilanjutkan dengan melihat dampak diskresi kebijakan fiskal terhadap permintaan Agregat output dan inflasi.

Permintaan output agregat adalah jumlah barang dan jasa yang ingin di konsumsi masyarakat yang diperoleh dari data Total Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal domestic dan perubahan inventori, dalam nilai Miliaran Rupiah.

Tingkat inflasi adalah menggunakan *unconditional variability* dari laju inflasi, metode ini didefinisikan sebagai deviasi dari laju inflasi bulanan dari rata-rata Selama 6,4 tahun (Januari 2010-oktober 2016), data inflasi yang digunakan adalah inflasi dari indeks Harga Konsumen (IHK).

Tekhnik dan Model Estimasi

Studi ini menggunakan tehnik estimasi, untuk menganalisa dampak kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah yang ekspansif), terhadap volatilitas permintaan Agregat dan Inflasi, dengan menggunakan tehnik estimasi model Ordinar Least Square (OLS) untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat dan Inflasi.

Model secara matematis dapat ditulis:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + U_t \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

Y = Variabel dependen

X_1, X_2 = Variabel independen.

β_1, β_2 = Koefisien

α = Konstanta

Pembentukan model dalam penelitian ini dapat ditulis :

$$FL_t = \alpha + \beta GDisk W_t + Y \text{ Variable control} + e \dots\dots\dots (2)$$

$$Yqdt = \alpha + \beta GDisk W_t + Y \text{ Variabel control} + e_t \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

- GDisk W_t : adalah (ΔG) : insentif / upah tambahan
- IFLt adalah Tingkat Inflasi di kota B. Aceh, adalah laju inflasi di Kota Banda Aceh yang dihitung secara bulanan dalam persentase.
- Yqdt adalah permintaan agregat, yaitu jumlah konsumsi rumah tangga terhadap makanan dan non makanan dalam miliaran rupiah
- GDisk W_t adalah jumlah Pengeluaran rutin pemerintah berupa tunjangan pegawai negeri Sipil atas nama tunjangan prestasi kerja (TPK) dalam Miliaran Rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model regresi linter berganda bisa menjadi model yang baik untuk uji interdepedensi variabel jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik, baik heteroskedisitas, autokorelasi, multikolonerialitas atau mampu untuk disebut BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). tetapi dalam penelitian ini uji multikoleneartitas tidak dilakukan karena variabel independen tidak lebih dari 1. Karena tujuan uji multikoleneartitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel lain dalam satu model.

Uji Normalitas

Tabel -1 menunjukkan uji normalitas nilai jague-bera dan probability. Dari hasil uji ditunjukkan nilai jague-bera 311.8423 dan nilai probabilitas 0.0000 (pengaruh TPK terhadap permintaan agregat). Begitu juga untuk nilai jague-bera 15.22593 dan probability 0.0000 (pengaruh TPK terhadap inflasi). Artinya nilai JB > dari nilai $\alpha = 0,05$. Jika probabilitynya adalah 0 atau mendekati 0, berarti data yang digunakan distribusi normal.

Tabel 1-1
Uji Normalitas

Jargue-bera	Probality
311.8423	0.0000
15.22593	0.0000

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi lainnya. Dengan menggunakan uji white membandingkan nilai $\text{Obs} \times \text{R-square}$ dengan $\alpha=0,05$. Tabel- 2 memperlihatkan nilai P-Value 0,5396 dan 0,3344, artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. maka bisa disimpulkan semua variabel terbebas dari heteroskedastisitas. seperti diperlihatkan oleh tabel-3.

Tabel - 2
Hasil Uji Heterokedastitas

Variabel	F- Statistik	Obs*R-Square	Sig
Gdisk , Inflasi	0.379799	0.379799	0.5396
Gdisk, Yqdt	4.631712	4.474697	0.3344

Sumber: Data Eviews 2017, (Diolah)

Uji Asumsi Alasik Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke-i dengan observasi ke-i-1. Contoh: misalkan sampel ke-20, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh tersebut, yaitu ada nilai selisih antara nilai observasi ke-18 dengan ke-19, nilai observasi ke-19 dengan ke-20, dan seterusnya.

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel di dalam model pestimasi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model estimasi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam uji statistik berikut, uji autokorelasi adalah dengan menggunakan Breusch-Godfrey, serial corelation LM test (jika probabilita $< 0,05$ maka ada korelasi serial. Dapat dilihat dari uji LM-test bahwa, nilai probabilita masing-masing untuk pengeluaran pemerintah (Gdisk, Inflasi = 0,0000) dan untuk pengeluaran pemerintah terhadap permintaan agregat (Gdisk, Yqdt = 0,0321), terjadi serial korelasi. Seperti tabel -3.

Tabel-3
Uji Serial Korelasi

Variabel	F- Statistik	Obs*R-Square	Sig
Gdisk , Infl	16.54922	0.0823	0.5396
Gdisk, Yqdt	23.34526	0.09107	0.3344

Sumber: Data Eviews 2017 (Diolah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel-2 ditunjukkan Prob (F-Statistik) dengan nilai $< \alpha = 0,05$). Masing-masing variabel dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen (mempengaruhi variabel dependen Permintaan Agregat dan Inflasi, dengan nilai masing-masing 0.0005 dan 0.0000.

Berdasarkan hasil uji secara parsial, variabel pengeluaran pemerintah mempengaruhi permintaan agregat dibuktikan dengan nilai signifikan $0,0536 < \alpha = 0,05$, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi inflasi dibuktikan dengan nilai probabilita $0,0520 < 0,05$. Akan tetapi variabel Inflasi hanya mampu dijelaskan pengeluaran pemerintah sebesar sebesar 71% , ditunjukkan oleh nilai R-Square 0,71390, dan variabel Permintaan Agregat mampu dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah hanya sebesar 43 %, dengan R-Square 0,43758. Suatu hubungan yang sangat lemah.

Penjelasan ini artinya bahwa pengeluaran pemerintah melalui pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) menyebabkan permintaan agregat meningkat secara signifikan, akan tetapi pengeluaran pemerintah tersebut bukan satu-satunya penyebab inflasi di Provinsi Aceh, penyebab inflasi di provinsi Aceh hanya mampu dijelaskan oleh model 43,7 persen ,berarti 57 persen dijelaskan oleh faktor lain.

Alasan yang bisa dikemukakan penyumbang inflasi di kota Provinsi Aceh bukan karena pengeluaran ekspansif pemerintah melalui pemberian Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada pegawai, karena hanya 1-5 persen dari jumlah penduduk Provinsi yang pekerjaannya pegawai negeri Sipil yang memperoleh TPK. Untuk jumlah tersebut belum signifikan mewakili gejolak inflasi, ada 95 persen penduduk lainnya yang melakukan transaksi ekonomi terhadap permintaan barang dan jasa.

Tabel-4
Hasil Uji model Regresi

Variabel	Koefisien	SE	t-statistik	Probabilita
C	168874.5	3.18E-06	-1.99151	0.0536
Gdisk	-6.32000	0.114787	-0.39782	0.0004
Yqdt	31.37700	0.122814	-1.99155	0.0503
C	-0.21838	1.82738	-0.119505	0.9052
Gdisk	8.42000	6.73000	0.125148	0.0000
Inf	0.57988	0.12286	0.633836	0.0520

Sumber : Data , 2017 (diolah)

Alasan lainnya kemungkinan tidak semua pegawai yang memperoleh TPK membelanjakan uangnya di ibukota Provinsi, sesuai theory ahli ekonomi Case & Fair, (1984) bahwa inflasi disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat (Demand-pull) dan inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya, seperti biaya produksi atau biaya transportasi (Cost – Push Inflation). Sesuai penelitian (Ackley; 1968 dalam Akram, Farroq, Husein, 2010) bahwa alternatif teori dorongan biaya adalah tekanan biaya Inflasi disebabkan ketika kekuatan monopoli besar perusahaan bisnis memungkinkan mereka untuk menaikkan harga.

Tabel -5
Statistik Uji Estimasi Model Least Square

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Permintaan Agregat Dan Inflasi

Variabel	R-Square	F- Statistik	F- Prob
Gdisk, Yqdt	0.71390	11.0328	0.0005
Gdisk,INF	0.43758	15.5635	0.0000

Sumber: Data, 2017, (diolah)

Setiap kali perusahaan-perusahaan menaikkan harga, biaya hidup naik. Pekerja kemudian menuntut upah yang lebih tinggi untuk menembus penurunan standar hidup mereka, dengan demikian memberikan korporasi alasan untuk menaikkan harga lagi dan lagi seperti halnya serikat buruh yang prasyarat untuk upah-push inflation, sehingga keberadaan pasar tidak sempurna memperjualbelikan barang dan jasa merupakan prasyarat untuk mendorong laba inflasi. Ketika proses tersebut menjadi tersebar luas itu menyebabkan inflasi, disebut juga Teori inflasi- biaya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa shock kenaikan pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran rutin insentif tambahan berdampak positif terhadap permintaan agregat namun tidak begitu significant. Tetapi berdampak negative terhadap inflasi, dampak negatif dari pengeluaran pemerintah tersebut sedikit bersebrangan dengan teori Keynes, namun ada penjelasan teori lain dibalik kesimpulan tersebut.

Tidak ada pengaruh yang begitu signifikan diantara dua variabel tersebut dari akibat naiknya pengeluaran pemerintah, berarti menunjukkan kebijakan ini masih efektif untuk dijalankan karena tidak berpengaruh buruk bagi perekonomian. Pengeluaran rutin melalui upah tambahan (W_t) dari pemerintah tidak berpengaruh dengan multiplier effect.

Kesimpulan diatas memiliki implikasi kebijakan yang jelas, dengan mempertimbangkan dampak negatif dari kenaikan pengeluaran pemerintah melalui pemberian tunjangan prestasi kepada pegawai terhadap permintaan agregat (y_{qdt}) dan Inflasi (INFL), tidak bisa dijelaskan dalam model ini karena persentase dari jumlah pegawai pemerintah yang sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk kota provinsi. Sehingga belum mewakili tingkat permintaan barang dan jasa, walaupun tingkat upah tambahan tersebut sangat besar secara personal. Kelemahan dari penelitian ini adalah karena data panel dengan observasi yang kecil. Serta asumsi yang dimasukkan terlalu lemah, bahwa kemungkinan mereka yang menerima tunjangan tambahan tidak semua membelanjakan uangnya di kota Provinsi.

Kebijakan pemerintah menaikkan pengeluaran rutin melalui tunjangan kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh bukanlah faktor yang mengakibatkan kondisi negative bagi perekonomian, walaupun Aceh menikmati inflasi tinggi ada banyak faktor lain yang mengakibatkan inflasi, tetapi tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Rekomendasi yang bisa disampaikan di sini adalah :

1. Agar pemerintah lebih bijak dalam agenda pengeluarannya terhadap insentif ini, terutama terhadap pengeluaran rutin, pemerintah harus meninjau kembali kembali dan mengadakan penyesuaian pada pengeluaran anggaran, dan kesenjangan pemberian insentif tersebut antar golongan dan jabatan perlu di perhatikan.
2. Dampak *shock* pengeluaran pemerintah terhadap inflasi kemungkinan dapat dijelaskan oleh *multiplier effect* dari pengeluaran pemerintah untuk investasi maka seharusnya pengeluaran pembangunan harus lebih besar dari pengeluaran rutin.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2014, *Indicator Statistik Ekonomi Indonesia*, BPP – BPPS Vol- XI, Jakarta –Indonesia
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2014, *Indicator Statistik Ekonomi Indonesia*, BPP BPPS Vol- XI, Jakarta –Indonesia.
- Banchard, OJ. (1990). *Suggestion for a New Set of Fiskal Indikator*, OECD Economics Departement. Working Papers, No.79. ECD Publishing.
- Case & Fare, (2007). *Prinsiple of Economics Eight Edition*, “prinsip-prinsip Ekonomi, Erlangga, Jakarta.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (2016). *Standar Satuan Biaya, Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016*.
- Frank J.LYSY. (1999). Investment and Employment with Unlimited Labor “ The Role of Agregat Demand” *Journal of Devolopment Economic* , 541 – 566, Nourt-Holland Publishing Company
- Perlambang, h. (2010). Analisis pengaruh Jumlah uang Beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap Tingkat Inflasi. *Jurnal Media Ekonomi*. 19(.)2, Ags – 010, Universitas Trisakti
- Hemming , R.M 2002, “*The Effectiviness of Fiscal Policy in Simultating Economic*.
- Hussen, Farroq, Akraam. (2010). Cost-Push Shocks and Inflation: An Empirikal analisis From the economy of Pakistan, Full Leght Research Paper, *Journal of Economic and Internasional Finance*. 2(12), 308-312 Desember 2010. Available Online at <http://www.academiojournal.org/IEIP> ISSN 2006-9812.
- Jhon Tafbu , Sirojuzilam. (2010). Analisa Hubungan Upah Tinggi Terhadap Produktivitas di Indonesia, *Jurnal Mepa Ekonomi*. Vol – 03, Universitas Malang
- McEachearn. (2002). *Makro Ekonomi, Teori, Aplikasi, dan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta
- Mankiw. (2006), *Prinsiple Of Economics, Pengantar Ekonomi Makro*, Salemba Empat, Jakata
- Perrotti, Robberto, (2002). Estimating The Effect of Fiscal Policy in OECD Coutries. *Eropean Central Bank Working Paper* no. 168
- Stat Analisiy, *Uji Signifikansi Variabel Dengan Pertimbangan Lag Length output VAR, Uji Kausalitas Engel Granger dan Model Var* , Be Royal Statistican, New Start Analisis.com.
- Stat Analisis, Part I ;*Uji Stationeritas, Kapan Uji Kointegration Johansen Test Dipakai dan Bagaimana Menentukan Panjang Lag/ lag Legth Criteria*, Be Royal Statisican, New Start Analisis.Com.